



**TERHADAP AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA DAPAT DIAJUKAN
BUKTI LAWAN (TEGENBEWIJS)
(Studi Kasus)**

Oleh :

RMJ. KOOSMARGONO, SH.

Disajikan sebagai bahan diskusi Jurusan Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Sabtu, 20 Agustus 1994

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

TERHADAP AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA DAPAT DIAJUKAN
BUKTI LAWAN (TEGENBEWIJS)
(Suatu studi kasus)

RMJ. Koosmargono, SH

A. PENDAHULUAN

Alat bukti tulisan merupakan salah-satu alat bukti yang dikenal dan diakui dalam hukum acara perdata kita pengaturannya terdapat dalam Herziene Indonesische Reglement/Reglement voor de Buitengewesten (HIR/RBg) tentang alat bukti tertulis yang bersifat sangat sumir. Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg hanya memberikan definisi tentang akta otentik. Pembuktian dengan tulisan diatur secara lebih lengkap dan rinci dalam buku keempat KUH Pdt (Pasal 1867 s/d 1894).

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan utama, terutama dalam lalu-lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila dikemudian hari timbul suatu perse- lisihan (Retnowulan, 1979 : 57 - 58).

Ada tiga macam tulisan sebagai alat bukti yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lain (Supomo, 1985 : 76).

Akta adalah tulisan yang ditanda tangani dan yang dibuat khusus (sengaja dibuat) untuk menjadi bukti. Agar tulisan dapat digolongkan dalam pengertian akta, tulisan tersebut haruslah ditanda-tangani (Hapsoro, 1989 : 2).

Menurut ketentuan dalam Pasal 1867 KUH Pdt, akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Didalam Pasal 1868 KUH Pdt dikatakan: akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang

mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Dilihat dari isinya (hal/peristiwa), dapat meliputi akta otentik dalam hukum publik maupun akta otentik yang bersifat keperdataan, maka pejabat yang berwenang yang dimaksud antara lain adalah panitera, jurusita, notaris, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Dengan demikian akta otentik dapat berupa akta pihak (partij acte), misalnya akta yang dibuat oleh seorang notaris atau akta notaris, dan ada pula akta otentik yang merupakan akta pejabat (ambtelijk acte) (Riduan, 1988 : 61).

Dalam fungsinya sebagai suatu alat bukti, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian. Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 165 ayat (1) HIR kekuatan pembuktiannya yang sempurna atau lengkap.

Bukti sempurna ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (genoegzaam) untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti lawan (tegenbewijs). (Setiawan, 1989 : 120).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun suatu akta otentik memiliki suatu kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), namun tidak tertutup kemungkinan untuk diajukannya bukti lawan (tegenbewijs).

Bukti lawan (tegenbewijs) adalah suatu upaya pembuktian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dalil yang mengatakan bahwa suatu akta adalah palsu atau dipalsukan.

Dikatakan bukti lawan oleh karena alat bukti ini dipergunakan untuk membantah kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan, maka perlu suatu prosedur khusus untuk mengajukannya.

B. PERMASALAHAN

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian itu, dimana masing-masing kekuatan pembuktian tersebut adalah sempurna. Namun kekuatan pembuktian tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diajukan bukti lawan. Baik HIR maupun RBg tidak mengatur secara khusus tentang cara pengajuan bukti lawan terhadap akta otentik yang dituduh palsu atau dipalsukan.

Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Dimanakah diatur kemungkinan satu pihak berperkara dapat mengajukan bukti lawan terhadap akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti ?
2. Dengan mengingat ketentuan Pasal 393 HIR/ Pasal 721 RBg maka berdasar ketentuan manakah kemungkinan diajukannya suatu bukti lawan (tegenbewijs) terhadap suatu akta otentik yang berkekuatan sempurna tersebut ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian akta otentik

Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg menentukan Surat (akte) yang sah ialah suatu syrat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan yang berhubungan langsung dengan perihal pada pokok surat itu.

Ketentuan mengenai akta otentik dalam HIR maupun RBg ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sebagaimana telah diuraian diatas.

Dikatakan juga oleh Pitlo, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu menurut undang-undang, mengenai hal yang diperbuat/dilakukannya atau apa yang ditangkap/diketahuinya disampaikan dan yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang (Hapsoro, 1989 : 27).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan, akta otentik adalah :

1. surat (akta),
2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang,
3. menjadi bukti yang sempurna,
4. bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya,
5. tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan yang berhubungan langsung dengan perihal pada pokok surat itu.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pajabat saja. Pejabat yang membuat haruslah pejabat yang berwenang untuk itu, disamping itu cara membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta dibawah tangan.

2. *Pejabat yang berwenang*

Siapakah yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang membuat akta? Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt) Stbl. 1860 No: 3 dikatakan :

Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan atau kutipan; semuanya itu apabila pembuatan akta

yang demikian itu, oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikhususkan kepada pejabat atau orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

3. *Kekuatan pembuktian akta otentik*

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (1982 : 27) bahwa akta otentik mempunyai :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, maksudnya ialah suatu tulisan yang tampaknya seperti akta otentik dianggap demikian dibuat dan ditanda tangani pajabat yang berwenang sampai dibuktikan sebaliknya.

Hal tersebut adalah logis sebab akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya hakim harus menerima apa yang nampaknya sebagai akta otentik adalah akta otentik, sampai orang membuktikan bahwa akta itu palsu, misalnya tanda tangan pejabat adalah palsu atau ada kata-kata yang ditambahkan.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian ini berhubungan dengan fakta, yaitu bahwa orang atau orang-orang tertentu pada waktu tertentu telah memberi pernyataan/uraian sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti memaksa mengenai tanggal pembuatannya, apa yang diterangkan oleh para pihak serta tanda tangan mereka atau pernyataan/keterangan pejabat.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian ini mengenai apakah benar apa yang ter cantum dalam akta tersebut, dan apakah keterangan/pernyataan tersebut berdasarkan kebenaran. Hal ini adalah merupakan pernyataan pihak (partij verklaring) yang merupakan bukti memaksa antara para pihak sendiri, mereka yang menerima hak dari pihak

tersebut dengan alas hak (titel) umum atau khusus.

Kekuatan pembuktian materiil dari akta otentik merupakan bukti memaksa terhadap siapa saja mengenai apa yang diterangkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal kewenangannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan, suatu akta otentik yang sah mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, yang berarti bahwa hakim terikat untuk percaya akan kebenaran akta otentik tersebut.

4. *Bukti lawan (tegenbewijs)*

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki suatu akta otentik tidak menutup kemungkinan diajukannya bukti lawan, apabila ada tuduhan kepalsuan atau pemalsuan dalam akta otentik. Dalam hal ada tuduhan pemalsuan atas akta otentik, maka pembuktiannya (pengajuan bukti lawan) diletakkan pada siapa yang menuduh adanya kepalsuan akta tersebut.

Kepalsuan suatu akta dapat dibedakan menjadi kepalsuan materiil (*materieele valsheid*), yaitu kepalsuan yang menyangkut kekuatan pembuktian lahiriahnya, dan kepalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*) yaitu kepalsuan yang menyangkut kekuatan pembuktian materiilnya.

Menurut ketentuan Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tentang Pembuktian dengan tulisan, dalam Pasal 1872 disebutkan :

Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apapun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata (Pasal 148 dst, 165 dst).

Untuk mengetahui tata caranya tersebut kita lihat beberapa ketentuan pada Bagian 5 Reglemen Acara Perdata (Rv) tentang Perselisihan mengenai asli tidaknya surat-surat dan tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang hal itu, yang dalam Pasal 148 ditentukan sebagai berikut :

Pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai asli tidaknya surat-surat yang hendak dipergunakan para pihak diadakan :

1. jika pihak yang dikatakan telah membuat surat dibawah tangan atau menanda tanganinya, menyangkal telah membuatnya atau menanda-tanganinya; (Pasal 1875 KUH Pdt)
2. jika pihak yang dilawan dengan menggunakan suatu surat dibawah tangan yang ditulis oleh pihak ketiga atau ditanda tangani oleh pihak ketiga itu dan menyatakan tidak mengakui surat atau tanda tangan orang yang dikatakan telah menulis atau menanda-tangani surat itu; (Pasal 1875 KUH Pdt)
3. jika salah satu pihak mengatakan bahwa surat itu palsu atau dipalsukan; (Pasal 1872 KUH Pdt).

Lebih lanjut dalam Pasal 150 ditentukan :

Dalam kejadian seperti tersebut dalam No.3 Pasal 148, maka pihak yang mengatakan bahwa surat yang dikemukakan adalah palsu atau dipalsukan dapat menuntut agar ia diberi kesempatan untuk membuktikannya baik dengan surat-surat, ahli-ahli, maupun dengan saksi-saksi.

Tetapi ia tidak akan diperbolehkan untuk itu sebelum menyampaikan di kepaniteraannya suatu akta yang ditanda-tangani olehnya sendiri atau oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu dengan suatu akta otentik, dan memuat pernyataan yang tegas bahwa surat-surat yang bersangkutan dianggap palsu atau dipalsukan dan juga menyebutkan tindakan-tindakan, keadaan serta alat bukti yang dipandang perlu untuk membuktikan kepalsuan atau dipalsukannya surat-surat itu.

Dari kata-kata dalam pasal-pasal tersebut diatas, dan seterusnya, jelas kelihatan bahwa ada aturan khusus mengenai cara-cara pengajuan bukti lawan dalam hal ada tuduhan kepalsuan atau dipalsukannya akta otentik.

HIR tidak mengatur cara-cara khusus pengajuan bukti lawan jika terjadi tuduhan adanya kepalsuan atau dipalsukannya suatu akta, baik otentik maupun akta dibawah

tangan.

Dalam Pasal 138, yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang tindakan hakim jika ada tuduhan akan keaslian suatu bukti tulisan, hanya mengatakan :

Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu, sesudah pemeriksaan itu harus diputuskannya apakah surat itu boleh dipakai dalam perkara itu atau tidak.

Baik dalam ayat 1 maupun ayat-ayat lainnya pasal tersebut tidak ditentukan lebih lanjut bagaimana cara mengajukan bukti lawan untuk menguatkan tuduhannya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pemasalahan dikemukakan sehubungan dengan pemeriksaan Mahkamah Agung atas perkara No. 1904/K/Sip/1982, maka dalam menelaah cara pengajuan bukti la-wan terhadap tuduhan adanya pemalsuan atau kepalsuan atas suatu akta otentik penulis mencoba melihat putusan Mahkamah Agung atas perkara tersebut yang dijatuhkan pada tanggal 30 Juli 1985.

Mahkamah Agung dalam perkara No.1904/K/Sip/1982 memeriksa perkara permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Luhur Sundoro yang oleh Pengadilan Negeri Semarang, dalam kedudukan nya sebagai Pelawan, maupun oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pemeriksaan banding telah dikalahkan.

Dalam memori kasasinya Pemohon kasasi (Luhur Sundoro) pada pokoknya menyatakan bahwa secara tiba-tiba pada babak terakhir pemeriksaan, Termohon kasasi III .dr. Soetardjo menuduh akte-akte No.14 tanggal 26 Agustus 1977 dan No. 8 dan No.9 tanggal 6 September 1977 sebagai akta palsu. Lebih lanjut Dalam memori kasasi disebutkan bahwa hakim pertama meskipun tidak pernah memeriksa kebenaran tuduhan tersebut tetapi berani mengatakan bahwa dr. Soetardjo tidak pernah menghadap notaris tersebut guna membuat dan menanda tangani akta No. 8 dan No. 9 tanggal 6 September 1977 tersebut.

K00
E
1994

KOOSMARQONO, RMJ.
Terdapat akta autentik sebagai alat bukti
dalam perkara pidana dapat diajukan bukti
kawan (Tegenbewijs) / RMJ. Koosmarqono ---
Semarang : FH UNDIP, 1994.
12 p. : krl. ; 30 cm
MAKALAH

1934/41/FH/1996

san selanya dalam perkara
e Lian dan kawan-kawan,
ggal 30 Juli 1985, Varia

... nomor perdana Okt. 1985-7) menjatuhkan putusan
sebagai berikut : "memerintahkan kepada PN Semarang untuk
membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan
selanjutnya memang gil kedua belah pihak, dan notaris
Yanuar Tirtaamijaya dengan membawa akta asli surat kuasa
tertanggal 6 September 1977 No.9, beserta dua orang saksi
yang tersebut dalam akta itu terlawan III Dr. Soetardjo
sendiri untuk hadir dalam persidangan PN Semarang yang
akan ditentukan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan
tambahan, dengan maksud untuk meneliti kebenaran akta
tertanggal 6 September 1977 No.9, dengan memeriksa notaris
Yanuar Tirtaamijaya beserta dua orang saksi nya tersebut
diatas dan terlawan III Dr. Soetardjo sendiri, sehingga
dari hasil pemeriksaan tambahan itu dapat diketahui apakah
mereka benar telah menanda tangani sendiri akta tertanggal
6 September 1977 No.9 tersebut.

Berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan Mahkamah
Agung tersebut diatas, Pengadilan Negeri Semarang

namun demikian mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut. Sebelumnya adalah bermula dari surat *pengakuan hutang* dari Terlawan III dr. Soetardjo dengan menjaminkan sebuah rumah (yang akhirnya menjadi sengketa), yang karena tidak dapat melunasi hutang tepat pada waktunya maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah maka perjanjian tersebut sebenarnya adalah *perjanjian semu* untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang-piutang antara Pelawan dan Terlawan III.

- b. Karena Terlawan III dr. Soetadjo sebagai debitur terikat pula dengan hutang-hutang dari isterinya (Terlawan IV) dalam perkara ini yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap sehingga terpaksa menanda tangani perjanjian-perjanjian dalam akta-akta notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*), yang dalam hal ini adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap Terlawan III,

Dalam kasus tersebut tidak jelas kepalsuan apakah yang dimaksud oleh Termohon kasasi III dr. Soetardjo. Hanya dapat diduga dari kata-kata yang mengatakan bahwa debitur (dr. Soetardjo) tidak pernah menghadap notaris untuk membuat akta dan menanda-tangani akta No.9 tanggal 6 September 1977, dapat disimpulkan bahwa kepalsuan yang didalilkan oleh Termohon kasasi III adalah kepalsuan intelektual.

Kalau kita proyeksikan pada ajaran tentang bukti lawan dalam hal adanya tuduhan kepalsuan, maka dapat dilihat bahwa pemeriksaan tuduhan kepalsuan dalam kasus ini tidaklah dijalankan dengan tata cara mengenai pemeriksaan asli tidaknya surat-surat yang dipakai sebagai alat bukti.

Tata cara apapun yang dipergunakan oleh Mahkamah

Agung dalam pemeriksaan tuduhan kepalsuan atas akta otentik dalam perkara No.1904/K/Sip/1982 tersebut, hasilnya adalah bahwa akta otentik yang dituduh palsu dinyatakan sebagai akta yang sah.

D. KESIMPULAN

1. Tata cara tentang pengajuan bukti lawan terhadap akta otentik yang dituduh palsu atau dipalsukan, diatur pada Bab II Reglemen Acara Perdata (Rv) dalam Pasal 148 dan seterusnya.
2. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusannya No.1904/K/Sip/1982 tertanggal 30 Juli 1985, pengajuan bukti lawan terhadap akta otentik yang dituduh palsu dalam perkara tersebut tidak dilakukan menurut cara khusus untuk itu, melainkan dengan cara pembuktian biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|------------------------------------|---|
| Koosmargono | <i>Hukum Pembuktian</i> , Bahan Kuliah Prof.BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang, 1989. |
| Koosmargono, dan Mochammad Dja'is. | <i>Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR</i> , bahan kuliah Prof.BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Fakultas Hukum UNDIP, Cetakan Ke 2, 1983. |
| O. Bidara, Martin P. Bidara, | <i>Hukum Acara Perdata</i> , Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. |

- Retnowulan Sutantio,
Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1979
- Riduan Syahrani *kum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Penerbit, Pustaka Kartini, 1988.
- Setiawan *Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti*, Varia Peradilan, Tahun IV, 28 - 9 - 1989.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit, Liberty Yogyakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, R. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Alumni Bandung, 1978.